

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

1. Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
2. Adko dan Ridwan. (2009). *Rumus dan Data Dalam Analisis Statistik Untuk Penelitian*. Cetakan ke 3. Bandung : Alfabeta.
3. Dunn William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Trj. Samodra Wibawa dkk. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
4. Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
5. Nugroho, R. (2008). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
6. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (mixedmethods)*. Bandung: Alfabeta.
7. —. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
8. —. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
9. Wibawa, S. (1994). *Kebijakan publik. Proses dan Analisis, Jakarta: Intermedia*.
10. Winarno Budi. (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses* :YogyakartaPT Media Pressindo

JURNAL

1. Alfana, G. Q. (2017). *Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Semarang:Universitas Negeri).
2. Avivantoro, D. (2016). *Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Puger Kabupaten Jember*.

3. Laoepada, S. B., & Pudjiastuti, L. (2017). *Pertanggung Jawaban Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”*.
4. Mel B, & Npm s. (2017). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 4 tahun 201 tentang Pedoman Umum Pelayanan Administrasi Terpadu Administrasi Kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak*. Jurnal NESTOR Magister Hukum, 3(3).
5. Miranti, A. P. (2015). *Studi eksploratif tentang faktor penentu keberhasilan implementasi program pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*. Kebijakan dan Manajemen Publik, 3(3).
6. Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). *Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik*. Jurnal Publik, 11(1), 1-12.
7. Sururi, A. (2017). *Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance*. 20:13, hal 33-35.
8. Susanti, A., Kusmanto, H., & Tarigan, U. (2018). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi*. Publikauma: Medan Area: Jurnal Administrasi Publik Universitas, 6(1), 47-57.
9. Saputra, A. L., Juliani, H., & Saadah, N. (2017). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun (2010) tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal*. Diponegoro: Law Journal, 6(1), 1-21.
10. Unaradjan, D. D. (2019). *Metode penelitian kuantitatif*. Jakarta: Unika Atma Jaya.
11. Purwanto, E. A. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (No. 1).
12. Yuliani, F. *Evaluasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Rumbai Pesisir*. Riau University: Doctoral dissertation.

DOKUMEN

1. Perbup. (2017). *Pendelegasian kewenangan penandatanganan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada camat.*
2. Permendagri. (2010). *Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).*